



PEMERINTAH
PROVINSI BALI

INDONESIA MAJU

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



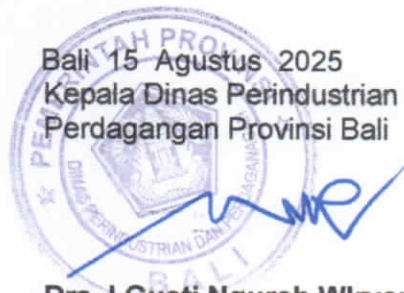
-  disperindag.baliprov.go.id
-  [@disperindag_bali](https://www.instagram.com/disperindag_bali)
-  disperindag@baliprov.go.id
-  Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon

KATA PENGANTAR

Puja Pangastuti Angayu Bagya kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026 dapat disusun sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2026 yang secara khusus menerjemahkan dan menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan yang termaktub pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD ke dalam perencanaan pembangunan tahunan di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Dalam penyusunan Rencana Kerja ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis terkait bidang Perindustrian dan Perdagangan. Selain itu Rancangan Rencana Kerja ini sedapat mungkin mengupayakan sinkronisasi dengan kebijakan- kebijakan nasional yang diambil oleh Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Perdagangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini

Bali 15 Agustus 2025
Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Bali



Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661231 199303 1 208



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Tahun 2026	6
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI BALI TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali	22
2.4 Review terhadap Rancangan RKPD	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	28
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	29
3.3 Program dan Kegiatan	29
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.....
	33
BAB V	PENUTUP.....
	35



DAFTAR TABEL

Diagram 1.1	Hubungan Dokumen Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	3
Tabel 2.1	Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	9
Tabel 2.2	Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Berdasarkan Golongan.....	9
Tabel 2.3	Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Berdasarkan Jabatan Struktural.....	9
Tabel 2.4	Aset Pada Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	9
Tabel 2.5	Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024.....	10
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Tahun 2020-2024.....	21
Tabel 2.8	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Provinsi Bali.....	25
Tabel 2.9	Program dan Kegiatan Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Tahun 2026.....	29

Lampiran 1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026 Provinsi Bali



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perindustrian dan perdagangan memiliki peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi Bali, berdampingan dengan sektor pariwisata dan pertanian dalam arti luas. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang industri dan perdagangan. Pembangunan industri daerah di Bali perlu dilakukan secara menyeluruh, optimal, dan berkelanjutan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan kesempatan berusaha, serta dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha yang luas. Dengan demikian, industri dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Sebagai destinasi wisata unggulan, Bali memiliki potensi besar dalam meningkatkan nilai tambah produk-produk khas yang berakar pada seni dan budaya dengan filosofi Tri Hita Karana. Selain produk seni, kebutuhan utama seperti bahan pangan juga harus tersedia secara stabil bagi masyarakat dan wisatawan. Oleh karena itu, stabilitas pasokan bahan pokok serta perlindungan konsumen menjadi perhatian utama. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali terus berupaya meningkatkan daya saing produk agar mampu menembus pasar regional dan global, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta memberikan perlindungan bagi konsumen.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pada tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Renja PD merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah. Rancangan Awal Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali menjadi masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2026. Melalui Forum Perangkat Daerah, rancangan awal ini disempurnakan sebelum menjadi bahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD. Setelah RKPD ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah, Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali disempurnakan dan dikirimkan kepada Bappeda Provinsi Bali untuk diverifikasi. Jika telah sesuai dengan ketentuan dan selaras dengan RKPD, dokumen tersebut akan diajukan ke Penjabat Gubernur melalui Sekretariat



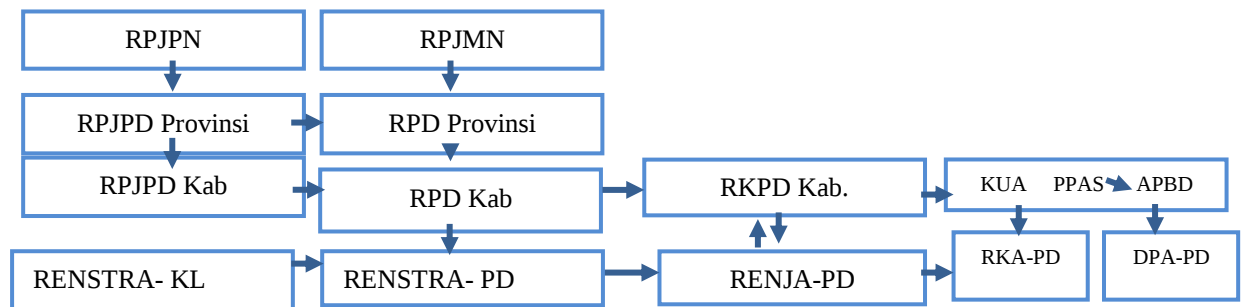
Daerah untuk ditetapkan menjadi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Dokumen ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

Proses penyusunan ini diawali dengan pengajuan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dilakukan orientasi internal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dengan menghadirkan Bappeda Provinsi Bali. Orientasi ini mencakup tugas pokok dan fungsi tim penyusun, tata cara penyusunan Renja, serta kesiapan data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Pada tahap ini, tim juga menyusun agenda kerja dengan pembagian tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing anggota.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan nasional terdiri dari berbagai dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan perencanaan di tingkat pusat, perencanaan pembangunan daerah juga mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan perencanaan yang matang dan sinergis, diharapkan pembangunan sektor industri dan perdagangan di Bali dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Diagram 1.1

Hubungan Dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Dasar hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
 10. Peraturan Presiden *Nomor 12 Tahun 2025 tentang* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;



15. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pemimpin Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2).
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali

1.3 Maksud dan Tujuan.

Sebagaimana diuraikan di depan bahwa Renja Perangkat daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat daerah, dan Renja Perangkat Daerah wajib sinkron dengan RKPD, maka maksud penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali 2026 adalah menjabarkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali tahun 2025-2029 khususnya Rencana Kerja Tahun 2026 serta sebagai bahan masukan pada penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2026 dan setelah RKPD ditetapkan, maka Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali 2026 akan disesuaikan pada RKPD tersebut.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali 2025 adalah :



- 1) Menjabarkan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025-2029 terutama pada tahun 2026.
- 2) Merancang program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali tahun 2026
- 3) Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2026 dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025-2029
- 4) Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2026 dengan RKPD tahun 2026

1.4 Sistematika Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2026

Sistematika Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2026 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I diuraikan tentang pengertian Renja, hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Pada Maksud dan Tujuan; memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Sistematika Penulisan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali; Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB II. Tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu berisi : 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan



Perdagangan Provinsi Bali, 3) Review terhadap RKPd, dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI

Pada Bab III Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut : 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, dan 3) Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bab IV. Renja Perangkat Daerah; diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PENUTUP

Bab V Penutup; Pada bab ini diuraikan antara lain : Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI TAHUN LALU

Dalam BAB II; Tentang Hasil Evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun Lalu berisi : 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, 3) Review terhadap RKPD, dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

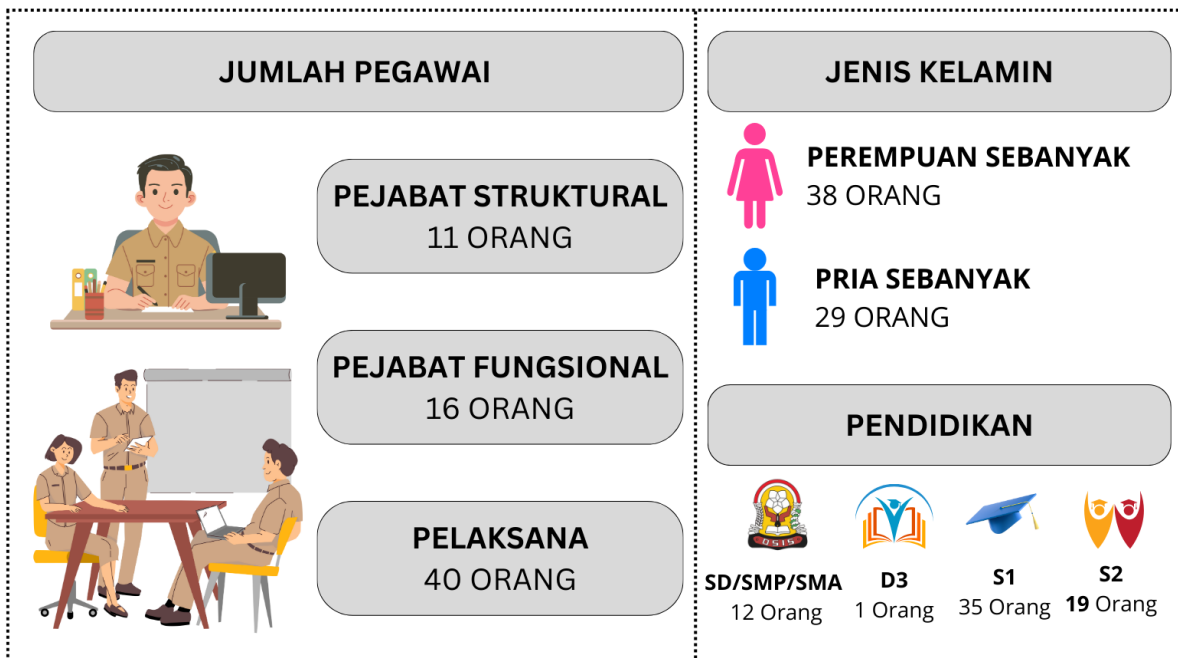
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2025 melaksanakan urusan Pemerintahan yaitu Urusan Pilihan Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Perindustrian dan Perdagangan merupakan Urusan Pilihan. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka Urusan Perindustrian dan Perdagangan tetap dinyatakan sebagai Urusan Pilihan.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali adalah: melaksanakan urusan pemerintah bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas mempunyai fungsi di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan provinsi: merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan administrasi, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan serta fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan data tahun 2024, komposisi kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah :

Tabel.2.1
Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Tabel.2.3
Aset Pada Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan





Pada tahun 2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 9 (Sembilan) Program dan 38 (tiga puluh delapan) Kegiatan 40 Sub Kegiatan. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 sebagai hasil pelaksanaan Renstra tahun pertama akan diuraikan secara detail berikut ini:



Tabel 2.5

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)	
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
1	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	Indeks	322.387.120,00	85,14	317.422.120,00	100	98,46%
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	14000	Dokumen	322.387.120,00	14197	317.422.120,00	101,4	98,46%
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	14000	Dokumen	322.387.120,00	14197	317.422.120,00	101,4	98,46%
2	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Kinerja	82,4	Nilai	18.293.251.406,00	83,87	16.785.606.243,00	101,8	91,76%
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100	Persentase (%)	756.227.700,00	100	545.583.658,00	100	72,15%
			Persentase Pelayanan Administrasi Umum - UPTD BPSMB	100	Persentase (%)		100		100	
			Persentase Pelayanan Administrasi Umum - UPTD Rumah Kreatif	100	Persentase (%)		100		100	
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	16.404.800,00	1	13.541.000,00	100	82,54%



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)	
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - UPTD BPSMB	1	Paket		1		100	
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket	281.562.000,00	8	225.727.700,00	100	80,17%
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - UPTD BPSMB	8	Paket		8		100	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - UPTD Rumah Kreatif	2	Paket		2		100	
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	117.500.000,00	1	89.338.800,00	100	76,03%
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - UPTD BPSMB	1	Paket		1		100	
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	18.638.900,00	2	12.963.250,00	100	69,55%
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - UPTD BPSMB	1	Paket		1		100	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - UPTD Rumah Kreatif	1	Paket		1		100	
	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Dokumen	9.840.000,00	24	10.675.000,00	100	108,49%



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)	
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - UPTD Rumah Kreatif	2	Dokumen		2		100	
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28	Laporan	312.282.000,00	28	193.337.908,00	100	61,91%
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPTD BPSMB	2	Laporan		4		200	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPTD Rumah Kreatif	1	Laporan		2		200	
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persentase (%)	1.409.415.560,00	100	1.201.729.000,00	100	85,26%
			Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - UPTD BPSMB	100	Persentase (%)		100		100	
			Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - UPTD Rumah Kreatif	100	Persentase (%)		100		100	
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	367.000.000,00	12	222.723.320,00	100	60,69%



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)	
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - UPTD BPSMB	1	Laporan		1		100	
	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	815.220.660,00	12	757.600.480,00	100	92,93%
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - UPTD BPSMB	1	Laporan		1		100	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - UPTD Rumah Kreatif	2	Laporan		2		100	
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	227.194.900,00	12	221.405.200,00	100	97,45%
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang terselesaikantepat waktu	100	Dokumen	64.854.000,00	100	55.336.841,00	100	85,33%
	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	64.854.000,00	3	55.336.841,00	100	85,33%
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100	Persentase (%)	14.709.918.886,00	100	13.778.274.325,00	100	93,67%
	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81	Orang/Bulan	14.709.918.886,00	81	13.778.274.325,00	100	93,67%
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Persentase (%)	1.352.835.260,00	100	1.204.682.419,00	100	89,05%



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)	
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah - UPTD BPSMB	100	Persentase (%)		100		100	
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah - UPTD Rumah Kreatif	100	Persentase (%)		100		100	
	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17	Unit	1.026.049.980,00	17	880.214.609,00	100	85,79%
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya - UPTD BPSMB	3	Unit		3		100	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya - UPTD Rumah Kreatif	2	Unit		2		100	
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	326.785.280,00	3	324.467.810,00	100	99,29%
3	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar ber SNI	1	Pasar	111.426.100,00	1	75.207.707,00	100	67,50%
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pasar yang dibina	2	Pasar	111.426.100,00	2	75.207.707,00	100	67,50%
	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	2	Laporan	111.426.100,00	2	75.207.707,00	100	67,50%



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)	
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp
4	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	persentase harga barang pokok	7	Persentase (%)	49.213.800,00	9,9	46.757.000,00	210,8	95,01%
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	12	Kali	49.213.800,00	12	46.757.000,00	100	95,01%
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12	Laporan	49.213.800,00	12	46.757.000,00	100	95,01%
5	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	55	Persentase (%)	349.991.600,00	56,79	315.796.717,00	100	90,23%
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang meningkat akses pasarnya	10	Pelaku Usaha	349.991.600,00	10	315.796.717,00	100	90,23%
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	25	Pelaku Usaha	49.991.600,00	25	48.395.500,00	100	96,81%
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	8	Pelaku Usaha	300.000.000,00	8	267.401.217,00	100	89,13%
6	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	49,7	Indeks	921.432.840,00	59,65	880.713.950,00	120	95,58%
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Konsumen yang diproses	100	Persentase (%)	498.711.340,00	100	498.630.140,00	100	99,98%
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK yang Aktif	1	BPSK	456.000.000,00	1	456.000.000,00	100	100,00%



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)	
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp
	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat LPKSM yang Aktif	3	LPKSM	42.711.340,00	3	42.630.140,00	100	99,81%
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku usaha yang menerapkan Tertib Niaga	50	Persentase (%)	146.873.880,00	100	106.236.190,00	200	72,33%
			Persentase Produk yang sesuai dengan ketentuan	50	Persentase (%)		100		200	
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang di awasi	45	Laporan	146.873.880,00	168	106.236.190,00	373,3	72,33%
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat hasil pengujian yang di terbitkan	45	Sertifikat	275.847.620,00	84	275.847.620,00	186,7	100,00%
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	45	Dokumen	275.847.620,00	86	275.847.620,00	191,1	100,00%
7	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	30	Persentase (%)	272.598.080,00	30	272.566.980,00	100	99,99%
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Toko yang memasarkan produk lokal krama bali	100	Toko	272.598.080,00	100	272.566.980,00	100	99,99%
	3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder , Tokoh Masyarakat atau Influencer	5	Laporan	272.598.080,00	5	272.566.980,00	100	99,99%
8	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh	1,5	Persentase (%)	2.615.308.500,00	1,5	2.515.392.873,00	100	96,18%



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (tahun-1) Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)	
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina	1,5	Persentase (%)	2.615.308.500,00	1,5	2.515.392.873,00	100	96,18%
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6	Dokumen	2.317.081.720,00	6	2.217.166.093,00	100	95,69%
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat - UPTD Rumah Kreatif	1	Laporan		1		100	
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4	Dokumen	298.226.780,00	4	298.226.780,00	100	100,00%



Beberapa hal penting dalam Evaluasi Pelaksanaan Renja Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 adalah: dari 9 (Sembilan) program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan yang dilaksanakan, capaian target kinerja kegiatan tercapai 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Keuangan tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali tergolong baik, secara umum Realisasi keuangan sebesar Rp 21.123.151.502 atau 92,10% dari target Rp 22.935.609.746.

Analisis Kinerja Pelayanan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dapat diuraikan sebagai berikut: Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali merupakan Dinas yang tidak mengukur kinerjanya berdasarkan SPM, tetapi menggunakan NSPK dan IKK serta IKU. Norma Standar Prosedur Kegiatan telah dimiliki, sedangkan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 IKK sebagai ukuran keberhasilan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.7. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Untuk jelasnya berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dapat diuraikan sebagai berikut: Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja IKU Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2020-2024

Tujuan	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Perindustrian dan Perdagangan yang Berdaya Saing	Meningkatnya Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	9%	9%	9%	9%	9,05%	9,04%	9,22%	9,19%	8,97%	8,69 %
	Meningkatnya sektor Perindustrian terhadap PDRB	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	6,10%	6,44%	6,68%	6,58%	6,62%	6,24%
	Meningkatnya daya saing ekonomi lokal	Persentase Produk yang terserap pasar	30%	30%	30%	30%	31%	30%	30%	30%	30%	31%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

Adapun Isu – Isu yang berkembang pada tahun 2026 Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
2. Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB

Dari isu strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

- 1) Sektor perdagangan merupakan salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat, kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali masih belum menunjukkan performa yang optimal. Hal ini terlihat dari pangsa sektor perdagangan yang cenderung stagnan bahkan mengalami penurunan relatif dibandingkan sektor lain seperti pariwisata dan konstruksi. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingginya ketergantungan aktivitas perdagangan terhadap sektor pariwisata, sehingga ketika terjadi penurunan kunjungan wisatawan, aktivitas perdagangan turut terdampak signifikan. Selain itu, struktur perdagangan di Bali juga masih didominasi oleh skala kecil dan menengah, dengan keterbatasan akses terhadap pasar digital, logistik, dan sistem rantai pasok modern. Kurangnya inovasi dalam model perdagangan, rendahnya tingkat digitalisasi pelaku usaha, serta terbatasnya daya saing produk lokal juga menjadi kendala dalam meningkatkan nilai tambah sektor ini. Selain itu, belum optimalnya sinergi antar wilayah dan rendahnya penetrasi produk-produk Bali ke pasar luar daerah maupun ekspor turut membatasi potensi pertumbuhan sektor perdagangan. Untuk itu, diperlukan strategi yang terarah dan terintegrasi guna meningkatkan daya saing sektor perdagangan di Bali, termasuk penguatan ekosistem perdagangan berbasis digital, peningkatan kualitas SDM pelaku UMKM, penyediaan infrastruktur logistik yang efisien, serta perluasan akses pasar domestik dan internasional. Dengan penguatan sektor perdagangan, diharapkan kontribusinya terhadap PDRB dapat ditingkatkan secara signifikan, sekaligus mendukung struktur ekonomi Bali yang lebih seimbang dan tangguh.
- 2) Sektor perindustrian di Provinsi Bali masih menunjukkan kontribusi yang relatif rendah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), khususnya jika dibandingkan dengan sektor unggulan lainnya seperti pariwisata dan pertanian. Padahal, sektor industri memiliki peran strategis dalam menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta mendorong transformasi ekonomi menuju struktur

yang lebih produktif dan berkelanjutan. Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya kontribusi sektor perindustrian antara lain adalah dominasi industri skala kecil dan rumah tangga dengan keterbatasan teknologi, modal, serta akses pasar. Selain itu, pengembangan industri manufaktur di Bali masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan lahan, tingginya biaya logistik, serta belum meratanya infrastruktur pendukung kawasan industri. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya diversifikasi produk industri, serta masih terbatasnya integrasi antara sektor industri dengan sektor lain seperti pertanian, kelautan, maupun ekonomi kreatif. Banyak potensi sumber daya lokal yang belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung industrialisasi berbasis kearifan lokal dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor industri, seperti pengembangan kawasan industri terpadu yang ramah lingkungan, peningkatan kualitas dan inovasi produk lokal, fasilitasi pembiayaan dan digitalisasi industri kecil dan menengah (IKM), serta penguatan kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Dengan langkah tersebut, sektor perindustrian di Bali diharapkan dapat tumbuh lebih kuat dan berperan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah.

2.4 Review terhadap RKPD Tahun 2026

RKPD Provinsi Bali baru diedarkan pada minggu pertama bulan Agustus 2026, sehingga penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan baru dilakukan pada minggu ke pertama bulan Agustus 2025. Untuk menyusun Renja dilakukan Review Rancangan Awal RKPD. Dalam Review terhadap Rancangan RKPD diuraikan sebagai berikut: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terutama hasil capaian kinerja tahun 2024 dan kebutuhan tahun 2026. Alasan proses tersebut dilakukan untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan serta menyesuaikan antara kinerja program dan kegiatan, kemampuan keuangan serta kebutuhan program dan kegiatan tahun 2026.

Temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan Provinsi Bali tahun 2026, tidak perlu mengusulkan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda (Lampiran 2 Tabel 2.8)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Forum Konsultasi Publik ada beberapa Usulan Masyarakat yang perlu ditelaah. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut: hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten maupun yang diusulkan ke Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan sebagai berikut :

1. Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh secara lisan maupun tertulis di masukan dalam daftar panjang;
2. Oleh Tim Penyusun Renja disusun sesuai dengan skala prioritas yang pada nantinya akan dibahas dalam Musrenbang menjadi daftar pendek

Tabel 2.8
Usulan Masukan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Provinsi Bali

No	Nama	Instansi	Masukan	Saran
1	Dr Sadguna	Akademisi	Secara global kita menghadapi ketidakpastian, indikasi resesi sudah terjadi pasti cepat atau lambat akan berdampak kepada kita. Sementara itu di nasional terjadi dinamika luar biasa banyak penekanan yang akan berdampak signifikan terhadap industri dan perdagangan kita. Isu efisiensi anggaran akan mempengaruhi pola konsumsi di masyarakat. Yang penting adalah bagaimana kita membangun bali supaya minimal ada 3 <i>outcome</i> penting yaitu industri bisa <i>well diversified</i> , perlu kerjasama pemerintah dan swasta. Ada diferensiasi produk sebanyak mungkin. Akan memungkinkan kita lebih mampu menghadapi goncangan. Oleh karena itu sekarang dimulai dari sektor industri kita harapkan supaya ada forum <i>pentahelic</i> . Bappenas sudah membuat kajian, disetiap kab kota sudah ada potensi. Kualitas SDM harus bagus. <i>Outcome</i> kedua adalah kita mempunyai industri modern	



No	Nama	Instansi	Masukan	Saran
			yang efisien dan produktif. Bali belum punya SDA dalam membuat program pengembangan industri, pastikan potensi di bali bisa dimanfaatkan dengan memanfaatkan kualitas SDM baik di pemerintah maupun swasta. Diawal pembangunan peran pemerintah sebagai lokomotif tapi kedepan peran lokomotif digantikan oleh sektor swasta. Berhadapan nanti membuat regulasi/ fasilitasi yang mengarah pada penciptaan iklim usaha. <i>Outcome</i> yang ketiga adalah meningkatnya hubungan terhadap pertumbuhan ekonomi bali dan meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dan perdagangan pada PDRB. Jangan kita membuat program yang tidak relevan dengan swasta. Kita secara periodik melakukan reuiu RKPD semoga sudah <i>inline</i> antara provinsi dan kabupaten/kota. Ada beberapa yang bisa ditambahkan terkait permasalahan yaitu struktur sektor perindustrian kita apakah sudah optimal? Seperti jumlah dan jenis pelaku usaha, akses pasar, kemampuan daya saing. Ketika kita melakukan hilirisasi kita bisa memilih rantai yang paling panjang. Perlu memikirkan teknologi berbasis teknologi. Jaringan akses pasar dari lokal, global dan internasional. Terkait implementasi Pergub 99 agar hotel hotel tidak membeli buah impor. Pergub 99 memerlukan 2 syarat yaitu kuantitas dan kualitas.	
2	IB Sutresna	Bappeda Prov Bali	Acara ini utamanya adalah mendapat masukan untuk penyempurnaan pada rancangan awal kita. Setelah ini akan dilaksanakan musrenbang dengan <i>stakeholder</i> yang lebih luas lagi. Sampai akhirnya akan dikeluarkan Perkada untuk mengesahkan RKPD kita. Pijakan dari RKPD sekarang adalah RPD 2024-2026. Disperindag ada pada prioritas pembangunan ke 3 yaitu ekonomi kerthi bali. Masa covid memberi kita pelajaran bahwa pariwisata kita lemah jika mendapatkan serangan dan solusinya kita akan membuat sektor primer. Disperindag ada pada sektor sekunder untuk	



No	Nama	Instansi	Masukan	Saran
			menjembatani sektor primer dan tersier. Disperindag mampu mengolah sektor primer untuk dipasarkan ke sektor tersier. Kebijakan yang harus diperhatikan adalah meningkatkan ragam dan produk industri lokal, menambah pemasaran industri lokal bali. Endingnya kita mampu menopang target secara nasional.	
3		KADIN Bali	Terkait pandemi bali sangat terpuruk, tentunya saya menyarankan negara lain banyak melakukan kolaborasi dan membuat insentif kepada produk lokal baik perijinan dipermudah dan membuat iklim lebih mudah untuk investasi. Di Singapura memberikan <i>free tax</i> untuk membuat terobosan baru. ini bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan daya saing. Kita harus mau berkolaborasi dengan luar kalau mereka mau berinvestasi disini.	
4	Eka	BPPOM	Kita harus support produk lokal. Bali banyak memiliki produk lokal, namun yang mendaftarkan bukan orang bali contoh ayam betutu. Tahun 2024 UMKM jaje potong sudah kita dampingi. Garam Spa Kusamba sudah kita dampingi. Yang membuat ribet adalah adanya biro jasa. Kami siap 2025 kedepan kita tetap ada pendampingan UMKM, pengujian produk lokal, spa, obat tradisional. Sentra akan kita damping sampai akhirnya akan dapat ijin edar. Produk kita belum dapat <i>matching business</i> , ada pendampingan untuk uji produk juga. Ada beberapa produk yang tidak bisa dipasarkan. Setiap tahun perdagangan bali selalu menjadi juara 1 tingkat nasional.	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Selanjutnya pada Pada Bab III Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut: 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, dan 3) Program dan Kegiatan

1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN disusunlah kebijakan Perdagangan pada Perpres Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Kementerian Perdagangan memiliki 8 arah kebijakan yaitu: 1) mengamankan pasar ekspor di pasar utama, 2) memperluas pasar pangsa ekspor di pasar prospektif dan hubungan perdagangan Internasional, 3) meningkatkan diversifikasi produk ekspor, 4) mengamankan pasar domestik, 5) meningkatkan kontribusi usaha dagang kecil menengah, 6) meningkatkan perlindungan konsumen, 7) meningkatkan efisiensi sistem dan distribusi logistik, 8) meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan. Sedangkan arah kebijakan pengembangan industri yang diamanatkan dalam RIPIN 2015-2035 dan RPJMN 2015-2019 pada prinsipnya harus mendorong pertumbuhan industri serta peningkatan daya saing industri nasional.

Terkait dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta isu strategis yang berkembang, maka ada beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali adalah:

- a. Mengembangkan industri berdaya saing tinggi berbasis kompetensi daerah
- b. Mengembangkan industri hijau yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya berkelanjutan
- c. Mengembangkan sistem informasi industri yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, dan basis data
- d. Menetapkan target ekspor, mendorong peningkatan kualitas produk ekspor daerah yang bernilai tambah tinggi, meningkatkan kemudahan fasilitasi pelayanan publik
- e. Menjaga stabilitas kebutuhan bahan pokok
- f. Meningkatkan sosialisasi terhadap konsumen



2) Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi Tujuan dan sasaran pada RPD Provinsi Bali 2024-2026, Rancangan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024-2026 maka, Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai adalah : ” **Terwujudnya Perindustrian dan Perdagangan yang Berdaya Saing**”, Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, ditetapkan sasaran strategis yaitu :

- a) Meningkatnya Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
- b) Meningkatnya Sektor Perindustrian Terhadap PDRB

3) Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran, dikembangkan Program dan Kegiatan. Program dan kegiatan Perindustrian dan Perdagangan berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain dan Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan.

Tabel 2.9
Program dan Kegiatan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	► Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	► Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	► Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	► Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	► Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	► Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	► Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	► Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
7	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
C	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
8	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas
	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
D	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
9	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
10	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
E	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
11	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
	▶ Peningkatan Citra Produk Ekspor
	▶ Pameran Dagang Internasional/Nasional
F	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
12	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
	▶ Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
	▶ Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen
	▶ Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
13	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
	▶ Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
14	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
	▶ Pengembangan Layanan Pengujian
G	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
15	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
	▶ Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
H	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
16	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
	▶ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
	▶ Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
	▶ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
I	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
17	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
▶	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pada Bab IV tentang Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terlampir dalam lampiran 1.



BAB V PENUTUP

Demikianlah Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2026 disusun, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2026 semoga ada manfaatnya dalam meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2026. Terima kasih.

Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Bali

Drs. I Gusti Ngurah Wiryanata, M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19661231 199303 1 208



Lampiran 1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2026 Provinsi Bali

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						35.375.574.246,00							46.102.500.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						35.375.574.246,00							46.102.500.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						24.668.946.802,00							34.092.500.000,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						22.922.306.764,00						-	30.322.500.000,00	
		[Meningkatkan Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi]	-	-	-	-	-	22.922.306.764,00	-	-	-	-	-	-	30.322.500.000,00	-
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Lengkap dan Tepat Waktu	-			100 %	78.812.816,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur	-	110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	78.812.816,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sub Kegiatan yang Lengkap dan Tepat Waktu	-			100 %	19.974.800.000,00			Melanjutka n hilirisasi dan meng mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur	-	26.050.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/ Bulan	19.932.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan meng mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		26.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		-	-	-	-	-	-	22.922.306.764,00	-	-	-	-	-	-	30.322.500.000,00	-
	3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	42.300.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		[Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi]	-	-	-	-	-	22.922.306.764,00	-	-	-	-	-	-	30.322.500.000,00	-



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian yang Lengkap dan Tepat Waktu	-			100 %	50.000.000,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur	-	25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	50.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Dilaporkan Lengkap dan Tepat Waktu	-			100% %	714.571.454,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur	-	1.247.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.267.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		16.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16 Paket	282.557.060,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		760.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	67.483.394,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		105.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	14.840.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		15.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				24 Dokumen	6.424.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		16.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				28 Laporan	325.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		335.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang yang Lengkap dan Tepat Waktu	-			100 %	1.093.326.050,00			Melanjutka n hilinsasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital, serta Pariwisata	Aparatur	-	1.370.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	290.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilinsasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital, serta Pariwisata	Aparatur		400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	576.131.150,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilinsasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital, serta Pariwisata	Aparatur		710.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	227.194.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital, serta Pariwisata	Aparatur		260.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi dengan baik	-			100 %	1.010.796.444,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital, serta Pariwisata	Apratur	-	1.520.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				17 Unit	834.042.460,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital, serta Pariwisata	Apratur		1.300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	176.753.984,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan meng e mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Apratur		220.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						105.132.984,00						-	510.000.000,00	
		[Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha]	-	-	-	-	-	105.132.984,00	-	-	-	-	-	-	510.000.000,00	-
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase Pemohonan SKA yang di proses sesuai waktu standar Pelayanan	-			100 %	105.132.984,00			Melanjutka n hilirisasi dan meng e mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Eksportir / Pelaku Usaha	-	510.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA														
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				14000 Dokumen	105.132.984,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan meng e mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Eksportir / Pelaku Usaha		510.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						25.000.000,00						-	150.000.000,00	
		[Meningkatkan kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi]	-	-	-	-	-	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000.000,00	-
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pasar yang dibina	-			8 Pasar	25.000.000,00			Melanjutka n hilirisasi dan meng mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Pasar Tradisional / Pasar Swalayan	-	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				9 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan meng mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Pasar Tradisional / Pasar Swalayan		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING						200.000.000,00						-	280.000.000,00	
		[Meningkatkan kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]	-	-	-	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	280.000.000,00	-



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Perkembangan Harga Bahan Pokok	-			9,5 %	180.000.000,00			Melanjutka n hilinisa si dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negen.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital, serta Pariwisata	Masyarakat	-	255.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				17 Laporan	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilinisa si dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negen.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital, serta Pariwisata	Masyarakat		255.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase Pelaku Usaha yang menerapkan tertib Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	-			100 %	20.000.000,00			Melanjutka n hilinisa si dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negen.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital, serta Pariwisata	Distributor / Pelaku Usaha	-	25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Distributor / Pelaku Usaha		25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						250.000.000,00						-	1.015.000.000,00	
		[Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor]	-	-	-	-	-	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.015.000.000,00	-
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi yang diikuti	-			1 Kegiatan	250.000.000,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Eksportir / Pelaku Usaha	-	1.015.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				6 Pelaku Usaha	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Eksportir / Pelaku Usaha		710.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi</i>				25 Produk	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilinsasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Eksportir / Pelaku Usaha		305.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						676.108.102,00						-	1.310.000.000,00	
		[Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk]	-	-	-	-	-	676.108.102,00	-	-	-	-	-	-	1.310.000.000,00	-
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penyelesaian Sengketa Konsumen</i>	-			100 %	573.606.900,00			Melanjutka n hilinsasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Konsumen / Pelaku Usaha / Masyarakat	-	1.155.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen														
			<i>Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif</i>				1 BPSK	523.606.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilinsasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Konsumen / Pelaku Usaha / Masyarakat		1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lembaga Pertindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif</i>				9 LPKSM	50.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilinsasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Konsumen / Pelaku Usaha / Masyarakat		155.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase pengawasan perlindungan konsumen</i>	-			100 %	102.501.202,00			Melanjutka n hilinsasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Konsumen / Pelaku Usaha	-	155.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06.1.03.0003		Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi</i>				100 Laporan	102.501.202,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilinsasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Konsumen / Pelaku Usaha		155.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						490.398.952,00						-	505.000.000,00	
		[Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri]	-	-	-	-	-	490.398.952,00	-	-	-	-	-	-	505.000.000,00	-



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang meningkat akses pemasarannya	-			4 UMKM	490.398.952,00			Melanjutka n hilinsasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Masyarakat / Pelaku Usaha	-	505.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														
			Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer				5 Laporan	490.398.952,00	Semua Kota,Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilinsasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Masyarakat / Pelaku Usaha		505.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						10.706.627.444,00							12.010.000.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						10.506.627.444,00						-	11.600.000.000,00	
		[Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri]	-	-	-	-	-	10.506.627.444,00	-	-	-	-	-	-	11.600.000.000,00	-
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang tumbuh	-			1,5 %	10.506.627.444,00			Melanjutka n hilinsasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Industri di Bali	-	11.600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi														
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Industri di Bali		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				15 Dokumen	126.162.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Industri di Bali		1.100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				21 Dokumen	10.280.465.444,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Industri di Bali		10.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						150.000.000,00						-	200.000.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian]	-	-	-	-	-	150.000.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000.000,00	-
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase Permohonan Izin yang Diproses Tepat Waktu	-			100 %	150.000.000,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Pelaku Usaha/IKM/Industri	-	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.				1 Dokumen	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Pelaku Usaha/IKM/Industri		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						50.000.000,00						-	210.000.000,00	
		[Meningkatkan Pemanfaatan Informasi Industri]	-	-	-	-	-	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	210.000.000,00	-



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Ketersediaan Data Industri	-			100 %	50.000.000,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Industri / Data Industri	-	210.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				660 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Industri / Data Industri		210.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		UPTD RUMAH KREATIF						915.577.632,00							1.363.400.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						915.577.632,00							1.363.400.000,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						915.577.632,00							1.363.400.000,00	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						206.883.902,00						-	263.400.000,00	
		-	-	-	-	-	-	206.883.902,00	-	-	-	-	-	-	263.400.000,00	-



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Dilaporkan Lengkap dan Tepat Waktu	-			100 %	58.277.000,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur	-	103.400.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	50.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		90.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.225.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		3.500.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3.212.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Parwisata	Aparatur		4.100.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi/ SKPD				1 Laporan	3.840.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Parwisata	Aparatur		5.800.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang yang Lengkap dan Tepat Waktu	-			100 %	44.555.410,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Parwisata	Aparatur	-	50.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	14.555.410,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Parwisata	Aparatur		50.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Parwisata	Aparatur		260.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2028	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi dengan baik	-			100 %	104.051.492,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur	-	110.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	104.051.492,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		110.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
2.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Penumbuhan Industri kreatif	-			51000 IKM	708.893.730,00						-	1.100.000.000,00	
		[Meningkatkan Industri kreatif lokal yang terkorelasi pada penyediaan pangan]	-	-	-	-	-	708.893.730,00	-	-	-	-	-	-	1.100.000.000,00	-
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang tumbuh	-			1,5 %	708.893.730,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustrian dan Perdagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	IKM / Pelaku Usaha	-	1.100.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang tumbuh	-			1,5 %	708.693.730,00			Melanjutka n hilinsasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	IKM / Pelaku Usaha	-	1.100.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	708.693.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilinsasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	IKM / Pelaku Usaha		1.100.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG						1.188.570.946,00							1.841.300.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.188.570.946,00							1.841.300.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						1.188.570.946,00							1.841.300.000,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						968.371.470,00						-	741.300.000,00	
		[Meningkatkan Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi]	-	-	-	-	-	968.371.470,00	-	-	-	-	-	-	741.300.000,00	-



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Dilaporkan Lengkap dan Tepat Waktu	-			100 %	36.741.540,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur	-	145.300.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.455.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		2.200.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16 Paket	17.147.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		120.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.038.040,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negen.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		20.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.100.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negen.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		3.100.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Jasa Penunjang yang Lengkap dan Tepat Waktu	-			100 %	171.274.886,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negen.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur	-	226.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	149.274.886,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		210.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	10.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negen.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		260.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi dengan baik</i>	-			100 %	760.355.044,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negen.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur	-	370.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				3 Unit	120.969.044,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negen.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		160.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	120.969.044,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilinsasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		160.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	639.386.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilinsasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Aparatur		210.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
2.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						220.199.476,00						-	1.100.000.000,00	
		[Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk]	-	-	-	-	-	220.199.476,00	-	-	-	-	-	-	1.100.000.000,00	-
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat hasil pengujian yang diterbitkan	-			55 Sertifikat	220.199.476,00			Melanjutka n hilinsasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital; serta Pariwisata	Masyarakat, Konsumen	-	1.100.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan				124 laporan	220.199.476,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negen.	Ekonomi Kerthi Bali : Pertanian, Kelautan dan Perikanan; Perindustri an dan Per dagangan; UMKM dan Koperasi; Ekonomi Kreatif dan Digital, serta Pariwisata	Masyarakat, Konsumen		1.100.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	
	J U M L A H							37.479.722.824,00							49.307.200.000,00		